

RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG
2015-2019



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG
2015

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karuniaNya Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang 2015-2019 dapat diselesaikan.

Rencana Startegis ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis tahun 2015 Pusat Pelatihan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian.

Rencana Strategis ini merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dan mungkin timbul, dan disusun untuk menjadi acuan bagi balai dalam penetapan program, kegiatan dan anggaran tahun 20152019.

Sebagai sebuah rencana, masih terbuka kemungkinan adanya perubahan sesuai perubahan lingkungan strategis. Oleh karena itu segala saran untuk penyempurnaan rencana strategis ini sangat kami harapkan.

Binuang, Juni 2015
Kepala BBPP Binuang,

Ir. Anwar Syarif, M.Ed.
Nip. 19580623 198103 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	
A. Kondisi Umum.....	1
B. Potensi dan Permasalahan	2
C. Isu Strategis	6
II. ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN TANTANGAN	
A. Kekuatan	8
B. Kelemahan	8
C. Peluang	9
D. Tantangan	9
III. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	
A. Visi	11
B. Misi.....	13
C. Tujuan	13
D. Sasaran Strategis	14
IV. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
A. Arah Kebijakan	17
B. Strategi	18
C. Kerangka Regulasi	18
D. Kerangka Kelembagaan	19
V. PROGRAM, INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK), TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
A. Program	20
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	20
C. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	20
D. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.....	21
E. Target Kinerja	22
F. Kerangka Pendanaan	
VI. PENUTUP	23
Lampiran-Lampiran:	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Jumlah Aparatur dan Non Aparatur Pertanian yang Mengikuti Pelatihan ..	24
	di BBPP Binuang Tahun 2010 sd 2014	
Lampiran 2	Potensi Ketenagaan pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang	25
Lampiran 3.	Potensi Prasarana dan Sarana pada Balai Besar Pelatihan	26
	Pertanian Binuang	

I. PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Pembangunan sektor pertanian saat ini masih memegang peranan yang sangat penting sebagai penyedia bahan pangan, bahan baku industri, penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyedia bahan pakan dan bioenergi, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, serta berperan dalam penurunan emisi gas rumah kaca.

Salah satu faktor kunci untuk meningkatkan peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi nasional adalah sumberdaya manusia pertanian yang profesional, inovatif, mandiri dan berdaya saing. Sumberdaya manusia tersebut terdiri dari petugas/aparatur lingkup pertanian di pusat dan di daerah, pelaku utama (petani, peternak dan pekebun) serta pelaku usaha agribisnis lainnya. Pembangunan sumberdaya manusia pertanian dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalismenya dilakukan antara lain melalui pelatihan. Di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian pelatihan diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian dan Balai Pelatihan Pertanian, di antaranya Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang (BBPP Binuang)

Pelatihan yang dilaksanakan di Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang saat ini adalah pelatihan berbasis kompetensi bagi aparatur dan non-aparatur pertanian. Pelatihan bagi aparatur mencakup Pelatihan Teknis Pertanian dan Pelatihan Fungsional bagi pejabat fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIHP) khususnya penyuluh pertanian. Pelatihan bagi non-aparatur mencakup Pelatihan Teknis Pertanian serta Pelatihan Manajemen dan Kewirausahaan Pertanian.

BBPP Binuang menyelenggarakan pelatihan bagi peserta aparatur dan non-aparatur yang berasal dari wilayah Kalimantan, yakni Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Kalimantan Tengah; Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Kalimantan Barat. Terdapat 55 kabupaten/kota yang mengirim peserta ke BBPP Binuang, yang terdiri dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan; 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah; sembilan kabupaten/kota di Kalimantan Timur; lima kabupaten/kota di Kalimantan Utara; dan 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat.

Dalam lima tahun terakhir (2010-2014) untuk mendukung pencapaian target Empat Sukses Pembangunan Pertanian di BBPP Binuang telah dilatih 4.838 orang aparatur pertanian dan 2.063 orang non aparatur pertanian. Dari jumlah 4.838 orang aparatur yang dilatih, 3.927 orang mengikuti pelatihan teknis pertanian dan 911 orang mengikuti pelatihan fungsional

pertanian. Dari jumlah 2.063 orang peserta diklat bagi non-aparatur pertanian, sebanyak 1.404 orang mengikuti pelatihan teknis pertanian dan 659 orang mengikuti pelatihan manajemen dan kewirausahaan pertanian. Rincian jumlah peserta pelatihan pada tahun 2010 sd 2015 dapat dilihat pada Lampiran 1.

B. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2015 ini BBPP Binuang didukung oleh 67 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 21 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Berdasarkan tingkat pendidikan, sumberdaya manusia PNS BBPP Binuang terdiri dari sembilan orang lulusan S2; 24 orang lulusan S1/D4; dua orang lulusan D3; 25 orang lulusan SLTA; empat orang lulusan SLTP; dan tiga orang SD. Diantara 67 orang PNS BBPP Binuang terdapat 11 orang pejabat struktural, yaitu satu orang Kepala Balai, tiga orang Kepala Bagian/Bidang, dan tujuh orang Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi.

BBPP Binuang memiliki 10 orang pejabat fungsional Widyaiswara, yang terdiri dari lima orang Widyaiswara dengan spesialisasi Budidaya Tanaman, dua orang Widyaiswara dengan spesialisasi Sosial Ekonomi Pertanian, dan dua orang Widyaiswara dengan spesialisasi Penyuluhan Pertanian. Dilihat dari segi pendidikan, dari 10 orang Widyaiswara yang ada, enam orang Widyaiswara berpendidikan S2; dua orang berpendidikan S1; dan dua orang Widyaiswara berpendidikan D4. Pada saat ini jumlah Widyaiswara belum mencapai standar jumlah yang dibutuhkan di BBPP Binuang yakni 22 orang.

Komposisi pegawai BBPP Binuang berdasarkan golongan, tingkat pendidikan dan jenis kelamin serta jumlah Pejabat Fungsional Widyaiswara berdasarkan jenjang jabatan, pendidikan, jenis kelamin, dan spesialisasi yang diampu disajikan pada Lampiran 2.

Dalam penyelenggaraan pelatihan diperlukan prasarana dan sarana pelatihan yang memadai. BBPP Binuang memiliki lahan yang telah bersertifikat dengan luas 11,88 Ha. Lahan ini terdiri dari lahan tempat berdirinya bangunan kantor, bangunan kelas dan aula, asrama, ruang makan, guest house, perpustakaan, mushalla, laboratorium, bengkel, screen house, instalasi pengolahan pupuk, lapangan olahraga bulu tangkis, dan lahan praktek berupa kebun karet, kebun kelapa sawit, kebun palawija, kebun hortikultura, dan

sawah. Prasarana diklat yang dimiliki BBPP Binuang sampai saat ini selain kantor dapat dilihat pada Lampiran 3.

2. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas BBPP Binuang adalah:

- a. Kurangnya jumlah dan tidak meratanya sebaran spesialisasi Widyaiswara, serta kurangnya kapasitas dan kompetensi Widyaiswara dan tenaga kediklatan lainnya. Hasil penilaian terhadap Widyaiswara BBPP Binuang oleh peserta diklat tahun 2014 menunjukkan nilai rata-rata Widyaiswara BBPP Binuang adalah 4.15 dari skala 5 (Sumber E-SIPP 2014). Nilai ini masih termasuk kriteria baik, namun belum meyakinkan untuk menggambarkan kompetensi Widyaiswara. Tenaga kediklatan yang ada saat ini disamping jumlahnya kurang (57 orang) dan tidak merata kompetensinya untuk memenuhi kebutuhan setiap bagian/bidang, 47,76% masih berpendidikan SLTA ke bawah. Dari keseluruhan tenaga balai yang ada baik Widyaiswara maupun tenaga kediklatan baru empat orang yang mengikuti Management of Training (MOT) dan delapan orang yang mengikuti Training Officer Course (TOC) yang dipersyaratkan bagi tenaga kediklatan.
- b. Prasarana dan sarana pelatihan masih belum memadai. Laboratorium masih belum sesuai dengan tuntutan teknologi yang berkembang saat ini. Jumlah dan mutu peralatan laboratorium yang ada (laboratorium pengolahan hasil dan laboratorium penyuluhan) belum dapat memenuhi kebutuhan praktek peserta diklat teknis dan diklat fungsional.
- c. Lahan berupa sawah atau kebun untuk praktek peserta diklat teknis pertanian belum tertata dengan baik. Belum ada lahan yang disediakan secara khusus untuk pertanian organik dan belum ada sarana praktek untuk pertanian hidroponik. Masih terdapat lahan yang perlu dibuka dan ditata agar dapat dimanfaatkan untuk pertanaman.
- d. Standarisasi mutu layanan kediklatan sudah menggunakan ISO 9001:2008 namun penerapannya belum dilakukan secara ketat dan konsisten.
- e. Program diklat yang dilaksanakan di BBPP Binuang belum semuanya diakreditasi. Dari sejumlah diklat yang diakreditasi belum ada program diklat yang mendapat nilai A. Sampai saat ini terdapat enam program diklat yang telah diakreditasi, yaitu Diklat Pengelolaan Lahan Rawa Pasang Surut (7 hari, 56 JP) dengan nilai akreditasi B; Diklat Optimalisasi Rancang Bangun Paket Teknologi Lahan Rawa Pasang Surut

(15 hari, 120 JP) dengan nilai akreditasi B; Diklat Teknis Budidaya Padi Organik (7 hari, 56 JP) dengan nilai akreditasi C; Diklat Agribisnis Kelapa Sawit (7 hari, 56 JP) dengan nilai akreditasi B; Diklat Agribisnis Karet (7 hari, 56 JP) dengan nilai akreditasi B; dan Diklat Teknis Budidaya Padi Lahan Rawa (7 hari, 56 JP) dengan nilai akreditasi B.

- f. Tata kelola kelembagaan masih belum optimal. Belum semua aturan hukum (peraturan perundang-undangan dan pedoman-pedoman dilaksanakan dengan baik). Masih ada sebagian pejabat dan pelaksana yang tidak mengetahui dan tidak memahami aturan hukum yang berkaitan dengan tugas yang dilaksanakannya.
- g. Kerjasama dengan instansi lingkup pertanian tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi di wilayah kerja BBPP Binuang telah berlangsung namun jumlah kerjasama dalam diklat teknis masih sedikit. Kerjasama lebih banyak pada pelaksanaan diklat fungsional (Diklat Dasar Penyuluh Pertanian Ahli, Diklat Dasar Penyuluh Pertanian Terampil, dan Diklat Alih Kelompok Bagi Penyuluh Pertanian) yang sangat dibutuhkan oleh para peserta diklat karena merupakan persyaratan bagi jabatan fungsional yang bersangkutan.

C. Isu Strategis

Isu strategis yang saat ini berkembang dan kemungkinan besar dalam jangka waktu lima tahun ke depan akan mempengaruhi perkembangan pelaksanaan tugas BBPP Binuang dalam aspek penyelenggaraan diklat dan dukungannya terhadap pengembangan agribisnis, adalah:

1. Kecukupan produksi (swasembada) komoditas strategis padi, jagung, kedelai, sapi, tebu, cabai, dan bawang merah serta pengurangan ketergantungan impor.
2. Peningkatan daya saing produk di dalam negeri untuk mengantisipasi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.
3. Pemantapan dan peningkatan daya saing produk.
4. Diversifikasi pangan untuk mengurangi konsumsi beras dan terigu.
5. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.
6. Penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi di Balai Besar Pelatihan Pertanian belum dapat memenuhi kompetensi yang diperlukan oleh petugas fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian untuk melaksanakan tugasnya dalam upaya meningkatkan kemampuan produksi para petani dan pelaku usaha agribisnis.

7. Diklat yang diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Pertanian belum sepenuhnya dapat meningkatkan kompetensi peserta untuk melakukan praktek karena terbatasnya prasarana dan sarana diklat.
8. Sertifikat yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian dalam bentuk Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan bagi aparatur atau Sertifikat Telah Mengikuti Diklat bagi non-aparatur belum dapat dijadikan sebagai jaminan bagi aparatur maupun aparatur yang berlatih untuk dapat bersaing dalam dunia kerja khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan isu strategis seperti disebutkan di atas, pelatihan yang diselenggarakan di BBPP Binuang dalam tahun 2015-2019 akan lebih banyak diarahkan pada diklat agribisnis komoditas strategis. Diklat seperti ini harus terintegrasi dengan praktek agribisnis yang dilaksanakan di BBPP Binuang secara berkesinambungan baik yang menghasilkan produk segar maupun produk hasil olahan. Prasarana dan sarana diklat yang diperlukan untuk kegiatan agribisnis haruslah ditingkatkan jumlah dan mutunya.

Dalam perancangan diklat penetapan Standar Kompetensi Kerja (SKK) akan menjadi hal yang sangat penting karena berkaitan dengan penyusunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan para pengguna jasa diklat baik aparatur maupun non-aparatur. SKK harus disusun oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian dengan melibatkan instansi asal peserta aparatur atau instansi pembina peserta nonaparatur dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam rangka peningkatan daya saing purnawidya diklat diperlukan SDM pertanian kediklatan yang kompeten. Widyaiswara sebagai motor penggerak dalam proses diklat serta tenaga kediklatan balai haruslah terlatih dan tersertifikasi sesuai spesialisasinya. Tenaga kediklatan yang sangat menentukan mutu penyelenggaraan diklat perlu ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan sesuai standar Management of Training (MOT) maupun Training Officer Course (TOC).

II. ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN TANTANGAN

A. Kekuatan

1. BBPP Binuang terletak pada lokasi strategis di tepi jalan trans Kalimantan yang menghubungkan Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.
2. BBPP Binuang memiliki sarana diklat berupa empat unit asrama full-AC dengan kapasitas tampung 120 orang, serta tiga ruang kelas belajar dan satu aula (fullAC).
3. BBPP Binuang menyelenggarakan enam diklat yang telah terakreditasi (lima program diklat terakreditasi B dan satu program diklat terakreditasi C).
4. Tersedianya pedoman dan petunjuk pelaksanaan di dalam penyelenggaraan diklat dalam bentuk peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.
5. Sistem manajemen BBPP Binuang telah tertata dengan adanya Standard Operating Procedures (SOP).
6. Widyaiswara yang ada di BBPP Binuang telah mengikuti diklat metodologi pelatihan dan diklat teknis sesuai spesialisasinya.
7. Sejak tahun 2012 BBPP Binuang telah memiliki sertifikat manajemen mutu ISO 9001:2008.

B. Kelemahan

1. Sarana praktek untuk kegiatan pelatihan belum lengkap dan memadai.
2. Kompetensi pejabat struktural dan staf pelaksana belum sesuai standar.
3. Jumlah Widyaiswara belum memenuhi standar kebutuhan dan distribusi spesialisasinya tidak merata.
4. Kompetensi Widyaiswara belum tersertifikasi.
5. Kurikulum dan metodologi diklat belum mantap.
6. SOP belum diimplementasikan dengan baik.
7. Budaya kerja (Komitmen, Keteladanan, Profesionalisme, Integritas dan Dsisplin) belum sepenuhnya diterapkan oleh pejabat dan staf pelaksana.
8. Pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa diklat belum prima.

C. Peluang

1. Hubungan koordinasi yang baik dengan instansi lingkup pertanian di wilayah kerja BBPP Binuang.
2. Kepercayaan pengguna jasa diklat terhadap kompetensi BBPP Binuang dalam melaksanakan diklat.
3. Tersedianya dana pemerintah kabupaten dan provinsi di wilayah kerja untuk pelaksanaan kerjasama diklat dengan BBPP Binuang.
4. Terdapat Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) di wilayah kerja BBPP Binuang yang memiliki kemampuan yang baik untuk bekerjasama dalam pelaksanaan pelatihan non-aparatur

D. Tantangan

1. Besarnya biaya transportasi peserta khususnya yang berasal dari luar wilayah Kalimantan Selatan untuk menghadiri diklat di BBPP Binuang.
2. Tuntutan kebutuhan pengguna jasa diklat aparatur dan non-aparatur yang semakin tinggi terhadap mutu diklat.
3. Sulitnya memperoleh tambahan tenaga kediklatan khususnya Widyaiswara yang berkualitas tinggi, baik melalui detasering pegawai maupun rekrutmen tenaga baru.

III. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 49/Permentan/OT.140/9/2011 tanggal 06 September 2011 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 104/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan nonaparatur pertanian.

Dalam melaksanakan tugasnya BBPP Binuang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
2. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
3. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
4. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;

5. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut bagi aparatur dan nonaparatur pertanian dalam dan luar negeri;
6. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut bagi aparatur dan nonaparatur;
7. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian;
8. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
9. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut;
10. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
11. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
12. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
13. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknis pelatihan fungsional dan teknik di bidang pertanian bagi aparatur dan nonaparatur pertanian;

14. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
15. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
16. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
17. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
18. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Binuang.

Seperti tercantum dalam uraian fungsi-fungsi di atas, BBPP Binuang memiliki kekhasan dalam pelaksanaan diklat teknis pertanian yaitu diklat teknis di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut. Dalam pengertian teknologi pertanian di lahan pasang surut, tercakup pula teknologi pertanian di lahan rawa lebak.

Dalam mendukung visi Pusat Penyuluhan Pertanian Badan PPSDMP yaitu Terwujudnya penyelenggaraan diklat yang profesional untuk mendukung pembangunan pertanian-bioindustri berkelanjutan” maka pada tahun 2015-2019 Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang menetapkan visi: “Menjadi Center of Excellence dalam menyelenggarakan pelatihan untuk menghasilkan SDM pertanian yang profesional, inovatif, mandiri dan berdaya saing”.

B. Misi

Untuk dapat menjadi Center of Excellence dalam menyelenggarakan pelatihan untuk menghasilkan SDM pertanian yang profesional, inovatif, mandiri dan berdaya saing maka BBPP Binuang menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menguatkan kapasitas kelembagaan pelatihan;
2. Mengembangkan ketenagaan diklat;
3. Mengembangkan manajemen mutu penyelenggaraan diklat;
4. Mengembangkan program dan jejaring kerjasama pelatihan pertanian dalam dan luar negeri.

C. Tujuan

Sejalan dengan tujuan Pusat Pelatihan Pertanian Badan PPSDMP maka tujuan yang hendak dicapai oleh BBPP Binuang adalah:

1. Menguatkan kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian pemerintah dan kelembagaan pelatihan petani yang mampu memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan;

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kediklatan yang profesional dan berkarakter pada kelembagaan pemerintah dan kelembagaan petani;
3. Mengembangkan manajemen penyelenggaraan diklat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
4. Mengembangkan diklat berbasis kompetensi melalui pemanfaatan IT;
5. Mengembangkan model dan teknik diklat; (vi) Mengembangkan Inkubator Usaha Tani/Manajemen;
6. Mengembangkan program yang responsif terhadap perubahan lingkungan strategis dan bersifat tematik
7. Mengembangkan jejaring kerjasama diklat yang memenuhi kebutuhan pasar.

D. Sasaran Strategis

Dalam mengembangkan kompetensi sumberdaya manusia aparatur dan non aparatur pertanian, BBPP Binuang pada tahun 2015–2019 akan melakukan 4 (empat) kegiatan utama yang terdiri dari:

1. Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian

- a) Terwujudnya kelembagaan BBPP Binuang yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional;
- b) Terwujudnya 139 unit Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) sebagai lembaga pelatihan yang mandiri dalam berusahatani dan mampu menyelenggarakan pelatihan/ permagangan berbasis IPTEK.
- c) Tersusunnya 75 dokumen kelembagaan pelatihan pertanian;
- d) Terwujudnya inkubator Usahatani di BBPP Binuang.

2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Peningkatan Ketenagaan kediklatan yang profesional dan berkarakter

- a) Meningkatkan kompetensi 88 orang (kumulatif) Widyaiswara BBPP Binuang sesuai spesialisasi utamanya dalam mendukung program prioritas dan pengembangan kawasan pertanian;
- b) Menambah 14 orang Widyaiswara melalui rekrutmen baru dan alih fungsi tugas sesuai standar kebutuhan dan kekhasan fungsi BBPP Binuang;

- c) Meningkatnya profesionalisme 350 orang tenaga kediklatan pada BBPP Binuang;
- e) Meningkatnya kompetensi 150 orang instruktur dan 210 orang pengelola P4S untuk menjadi wirausahawan yang mampu bersaing di pasar nasional dan internasional melalui penguasaan IPTEK.

3. Terwujudnya Sistem Manajemen Penyelenggaraan Diklat yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel

- a) Meningkatnya kompetensi 6.000 orang aparatur melalui Diklat Teknis, Diklat Fungsional, dan Diklat Profesi untuk mendukung program prioritas dan pengembangan kawasan pertanian serta reformasi birokrasi yang responsif gender;
- b) Meningkatnya kompetensi 6.300 orang non aparatur melalui Diklat Teknis serta Diklat Manajemen dan Kewirausahaan untuk mendukung program prioritas dan pengembangan kawasan pertanian serta responsif gender;
- c) Mengembangkan evaluasi, pemantauan dan meningkatkan koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan Diklat.

4. Berkembangnya Jejaring Kerjasama Diklat Dalam dan Luar Negeri

- a) Meningkatnya promosi, publikasi, dan sosialisasi kelembagaan pelatihan melalui berbagai media informasi seperti pameran, profil, media cetak, elektronik, diorama, display, dan lain-lain;
- b) Meningkatnya jejaring kerjasama diklat dan/atau permagangan dalam dan luar negeri serta sumber pembiayaannya;
- c) Meningkatnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kerjasama diklat dan permagangan pertanian dalam dan luar Negeri dengan pihak terkait.

IV. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan

Arah kebijakan umum Badan PPSDMP dalam pengembangan sumberdaya manusia pertanian, adalah: (i) pemberdayaan peran dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian kecamatan (BPP/BP3K) sebagai pusat koordinasi program dan kegiatan di wilayah; (ii) peningkatan daya saing dan kinerja balai pelatihan; (iii) revitalisasi STPP dan SMK-PP serta sertifikasi profesi pertanian; dan (iv) pemantapan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel. Adapun fokus Badan PPSDMP dalam upaya pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui peningkatan efektifitas penyuluhan dalam mendukung pencapaian target pembangunan pertanian yang mencakup pelaku utama dan pelaku usaha; penyuluh dan petugas teknis; dan aparatur pemerintah terkait pertanian lainnya, serta pemenuhan unsur daya saing tenaga kerja sektor pertanian

Sejalan dengan arah kebijakan Badan PPSDM Pertanian terkait dengan kegiatan Pelatihan Pertanian difokuskan pada ***Peningkatan Daya saing dan kinerja UPT Pelatihan***, yaitu:

1. Membangun eksistensi dan kemandirian lembaga melalui program berorientasi pasar, pengembangan agribisnis dan optimalisasi sarana prasarana bagi berbagai kegiatan produktif dan bernilai tinggi;
2. Pengembangan Kelembagaan dan Sarana-Prasarana UPT Pelatihan Menuju Badan Layanan Usaha (BLU);
3. Peningkatan kompetensi Widyaiswara dan tenaga kediklatan lainnya diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi yang profesional dan berkarakter;
4. Diklat Berbasis Standar Kompetensi Kerja yang berdaya saing;
5. Pengembangan model dan pola diklat yang berorientasi pasar, bio-industri berkelanjutan, berbasis kawasan, diklat di tempat kerja, berbasis kreatifitas, dan lain-lain;
6. Peningkatan peran 10 UPT Pelatihan Pusat dalam penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian (BP3K);
7. Fasilitasi P4S sebagai lembaga diklat swadaya bagi non aparatur khususnya petani;

8. Pengembangan Jejaring Kerjasama dan Kemitraan dalam dan luar negeri yang saling menguntungkan.

B. Strategi

Strategi kebijakan pelatihan pertanian adalah meningkatkan Daya Saing dan Kinerja Balai Pelatihan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Standarisasi mutu layanan kediklatan;
2. Peningkatan prasarana dan sarana UPT pelatihan pertanian.
3. Pemberdayaan P4S sebagai penyelenggara diklat non-aparatur.
4. Peningkatan kapasitas Widyaiswara dan Tenaga Kediklatan;
5. Pemanjapan sistem pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan daya saing;
6. Pengembangan program dan jejaring kerjasama pelatihan.

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dijadikan pedoman bagi BBPP Binuang adalah kerangka regulasi yang disusun oleh Pusat Pelatihan Pertanian. Kerangka regulasi selain sebagai alat untuk mencapai tujuan/sasaran pengembangan kapasitas aparatur dan non aparatur pertanian, kerangka regulasi juga disusun sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pengembangan sumberdaya manusia aparatur dan non aparatur pertanian. Regulasi yang akan disusun meliputi:

1. Payung hukum transformasi kelembagaan UPT Pelatihan menjadi Lembaga Diklat Mandiri/Badan Layanan Usaha (BLU);
2. Meningkatkan legalitas dasar hukum Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Inkubator Usahatani menjadi Pedoman Umum/Permentan Pengelolaan Inkubator Usahatani.
3. Pemanfaatan payung hukum diklat berbasis kompetensi dengan pemanfaatan IT.

D. Kerangka Kelembagaan

Tugas dan fungsi UPT Pelatihan disesuaikan dengan kondisi lingkungan strategis untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi eselon I yang lebih profesional.

V. PROGRAM, INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK), TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Program

Program Badan PPSDM Pertanian adalah Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan Pertanian, yang dijabarkan pada kegiatan Pusat Pelatihan Pertanian yaitu Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian. Dalam mengimplementasikan Program tersebut Pusat Pelatihan Pertanian merumuskan kegiatan dan indikator kedalam empat pilar yaitu : (i) Peningkatan Penyelenggaraan Diklat Pertanian; (ii) Kelembagaan Pelatihan Pertanian; (iii) Peningkatan Ketenagaan Pelatihan Pertanian; (iv) Pengembangan Jejaring Kerjasama Diklat.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Puslatan dengan tujuan untuk: (1) menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); (2) menyampaikan rencana kerja dan anggaran; (3) menyusun dokumen penetapan kinerja; (4) menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan (5) melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai Rencana Strategis BBPP Binuang tahun 2015-2019.

Indikator Kinerja Utama pada BBPP Binuang mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pusat Pelatihan Pertanian tahun 2015-2019 meliputi:

1. Jumlah aparatur pertanian yang meningkat kompetensinya.
2. Jumlah non aparatur pertanian yang meningkat kompetensinya.

C. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Mengacu kepada IKK yang terdapat pada Renstra Pusat Pelatihan Pertanian, IKK BBPP Binuang adalah sebagai berikut:

1. Jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui diklat (orang);
2. Jumlah non aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui diklat (orang);
3. Jumlah UPT pelatihan yang meningkat standarisasi pelayanannya (unit).
4. Jumlah kelembagaan pelatihan petani (P4S) yang diklasifikasi (unit);
5. Jumlah ketenagaan pelatihan pertanian (Widyaiswara, tenaga teknis kediklatan, instruktur P4S dan pengelola P4S) yang ditingkatkan kompetensinya (orang).

D. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	Tertatanya kelembagaan pelatihan pertanian	Jumlah kelembagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan (kelembagaan UPT Pusat, P4S dan Agro Techno Park)
	Terfasilitasinya ketenagaan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi	Jumlah ketenagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan
	Terlatihnya aparatur dan nonaparatur pertanian untuk meningkatkan kompetensi kerja	Jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui diklat.
		Jumlah non-aparatur pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan
Tersusunnya dokumen Norma, Standar, Pedoman dan Kebijakan (NSPK)	Jumlah dokumen program dan kerjasama, penyelenggaraan pelatihan, kelembagaan dan ketenagaan pelatihan, serta pemberdayaan petani yang dihasilkan	

E. Target Kinerja

NO	PROGRAM/KEGIATAN UTAMA/IKK	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian						
1.	Jumlah kelembagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan (kelembagaan UPT Pusat, P4S dan Agro Techno Park)	14	21	30	34	40
2.	Jumlah ketenagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan	130	139	150	187	192
3.	Jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui diklat.	930	1.050	1.170	1.350	1.500
4.	Jumlah non-aparatur pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan	1.200	1.230	1.260	1.290	1.320

NO	PROGRAM/KEGIATAN UTAMA/IKK	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
5.	Jumlah dokumen program dan kerjasama, penyelenggaraan pelatihan, kelembagaan dan ketenagaan pelatihan, serta pemberdayaan petani yang dihasilkan	15	15	15	15	15

F. Kerangka Pendanaan

Sejalan dengan target yang akan dicapai BBPP Binuang dalam kurun waktu 2015– 2019, berikut ini anggaran yang dibutuhkan sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN UTAMA/IKK	Alokasi Anggaran (Rp Juta Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Mantapnya sistem pelatihan pertanian dalam meningkatkan kompetensi aparatur pertanian dan non-aparatur pertanian; daya tarik pertanian bagi tenaga kerja muda; pelibatan perempuan petani/pekerja dan Inkubator Usahatani mendukung Agro Techno Park (ATP)	22.000	26.400	31.680	38.016	45.619

VII. PENUTUP

Rencana Strategis BBPP Binuang tahun 2015–2019 menggambarkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan pelatihan pertanian lima tahun mendatang, disusun dengan mengacu kepada: (i) hasil-hasil yang dicapai pada periode 2010 - 2014, (ii) permasalahan dan tantangan yang dihadapi, dan (iii) Rencana Strategis Badan PPSDMP 2015-2019 dan Rencana Strategis Puslatan 2015–2019.

Penyusunan Rencana Strategis BBPP Binuang tahun 2015–2019 dimaksudkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia pertanian yang kompeten dan berkarakter untuk mendukung pembangunan pertanian-bioindustri berkelanjutan melalui penyelenggaraan diklat yang profesional dan berdaya saing, sebagai upaya dalam mendukung terwujudnya 8 (delapan) langkah pembangunan pertanian, yaitu: (i) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi, Jagung, Kedelai; (ii) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tebu; (iii) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Daging; (iv) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Cabe dan Bawang Merah; dan (v) Peningkatan Diversifikasi Pangan; (vi) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor dan Substitusi impor; (vii) Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergy; (viii) Peningkatan Kesejahteraan Petani.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Jumlah Aparatur dan Non Aparatur Pertanian yang Mengikuti Pelatihan di BBPP Binuang Tahun 2010 sd 2014

Tabel 1. Jumlah Aparatur dan Non Aparatur yang Mengikuti Pelatihan dengan Dana DIPA BBPP Binuang tahun 2010 sd 2014

No.	Jenis Diklat	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
1.	Pelatihan Teknis Pertanian Bagi Aparatur	180	690	804	1.293	960	3.927
2.	Pelatihan Fungsional Pertanian Bagi Aparatur	0	390	321	200	0	911
3.	Pelatihan Teknis Pertanian Bagi Non Aparatur	30	240	616	420	98	1.404
4.	Pelatihan Manajemen dan Kewirausahaan Pertanian Bagi Non Aparatur	180	60	59	150	210	659
	Jumlah	390	1.380	1.800	2.063	1.268	6.901

Lampiran 2. Potensi Ketenagaan pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang

Tabel 1. Komposisi Pegawai BBPP Binuang Berdasarkan Golongan, Tingkat Pendidikan, dan Jenis Kelamin

No.	Gol.	Pendidikan Akhir dan Jenis Kelamin														Jumlah
		S2		S1		D4		D3		SLTA		SLTP		SD		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	Gol. I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	5
2.	Gol. II	0	0	0	0	0	0	2	0	6	5	0	0	2	0	15
3.	Gol. III	2	1	9	9	2	0	0	0	11	3	0	0	0	0	37
4.	Gol. IV	6	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
	Jumlah	8	1	12	9	3	0	2	0	17	8	4	0	3	0	67

Tabel 2. Jumlah Pejabat Fungsional Widyaiswara Berdasarkan Jenjang Jabatan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	S3		S2		S1		D4		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	Widyaiswara Pertama	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2.	Widyaiswara Muda	0	0	1	1	1	0	1	0	4
3.	Widyaiswara Madya	0	0	3	0	1	0	0	0	4
4.	Widyaiswara Utama	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Jumlah	0	0	5	1	2	0	2	0	10

Tabel 3. Jumlah Pejabat Fungsional Widyaiswara Berdasarkan Jenjang Jabatan dan Spesialisasi

No.	Spesialisasi Widyaiswara	WI Pertama		WI Muda		WI Madya		WI Utama		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	Budidaya Tanaman	0	0	2	1	1	0	1	0	5
2.	Pengelolaan limbah Tanaman	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Hama dan Penyakit Tanaman	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Konservasi Lahan dan Klimatologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Mekanisasi Pertanian	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pasca Panen dan Teknologi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sosial Ekonomi Pertanian	0	0	1	0	1	0	0	0	2
8.	Penyuluhan Pertanian	1	0	1	0	1	0	0	0	3
	Jumlah	1	0	4	1	3	0	1	0	10

Lampiran 3. Potensi Prasarana dan Sarana pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang

Tabel 1. Prasarana dan Sarana Diklat pada BBPP Binuang

No.	Jenis Prasarana/Sarana	Jumlah (Unit)	Kapasitas Tampung (orang)
1.	Aula Bangkinang	1	120
2.	Ruang Kelas Gitaan	1	60
3.	Ruang Kelas Sangkuang	1	30
4.	Ruang Kelas Tangkuhis	1	30
5.	Ruang makan	2	120
6.	Asrama Mundar	1	30
7.	Asrama Pampakin	1	30
8.	Asrama Kasturi 1	1	30
9.	Asrama Kasturi 2	1	30
10.	Perpustakaan	1	30
11.	Laboratorium Pengolahan Hasil	1	30
12.	Laboratorium Penyuluhan	1	15
13.	Instalasi Pengolahan Pupuk Organik	1	
14.	Rumah Jamur	1	
15.	Gudang Penyimpanan Hasil Pertanian	1	
16.	Guest House Maritam	1	8
18.	Guest House Rambai	1	4
19.	Mushalla	1	70